

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :	06
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

TUGAS pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, sebagaimana paraturan daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2017, melakukan pembantuan pengelolaan keuangan daerah. Meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan membuat laporan keuangan serta aset daerah secara terpadu. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. Maka dari itu, BPKAD selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Program untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dengan melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan organisasi perangkat daerah (OPD), rekonsiliasi piutang dan utang, rekonsiliasi dengan Bidang Aset untuk meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan OPD dan selalu berkordinasi dengan BPKP. Selain itu Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) sudah dilakukan dan diterapkan oleh semua OPD, berdasarkan Laporan hasil



Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Kepala BPKAD Absiah ketika audiensi dan sosialisasi peningkatan modal dasar Bank Kalteng.

pemeriksaan BPK – RI.

“Diharapkan OPD di lingkungan Pemko Palangka Raya melakukan beberapa hal tersebut demi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) ditambah dengan peningkatan sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan OPD,” jelas Absiah.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Selain petugas yang punya akutanbilas untuk memprosesnya, ada juga komitmen pengelolaan keuangan daerah yang

profesional dari seluruh pimpinan OPD, peningkatan sistem pengendalian intern oleh seluruh pegawai dan pejabat OPD, dan pembinaan secara berkesinambungan dari PPKD kepada OPD.

“Selain itu, pengembangan kapasitas sdm pengelolaan keuangan daerah yang berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan audit internal oleh Inspektorat Daerah yang profesional. Serta peningkatan kajian aspek legalitas dalam seluruh proses pengelolaan Keuangan Daerah,” tutupnya. (adv)